



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis	5
2.2 Indikator Kinerja Utama	8
2.3 Perjanjian Kinerja	15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	27
3.2 Realisasi Anggaran	46

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

2.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	12
2.2	Perjanjian Kinerja Dinas PPKBPPPA	16
3.1	Pencapaian Kinerja Sekretariat Triwulan I	28
3.2	Pencapaian Kinerja Triwulan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34
3.3	Pencapaian Kinerja Triwulan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40
3.4	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019 Dinas PPKBPPPA	45
3.5	Capaian Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2019	47
3.6	Capaian Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2019	47
3.6	Capaian Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2019	56
3.7	Capaian Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2019	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, maka pembagian urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mencakup :

1. Sub Bidang Pengendalian Penduduk, yakni: a) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, b) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota.
2. Sub Bidang Keluarga Berencana, yakni: a) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local, b) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), c) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota, d) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
3. Sub Bidang Keluarga Sejahtera, yakni: a) Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, b) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Sedangkan pembagian urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup :

1. Sub Bidang Kualitas Hidup Perempuan, yakni: a) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota, b) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota, c)

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.

2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan, yakni: a) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota, b) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota, c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota,
3. Sub Bidang Kualitas Keluarga, yakni: a) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota, b) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota, c) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota,
4. Sub Bidang Sistem Data Gender dan Anak, yakni Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.
5. Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA), yakni: a) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota, b) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota,
6. Sub Bidang Perlindungan Khusus Anak, yakni: a) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota, b) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota, c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:



Penetapan rencana strategis program dan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan lainnya yang diberikan kepala daerah



Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas PPKBPPPA



Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi



Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas PPKBPPPA



Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas PPKBPPPA

1.2 Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan dasar Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

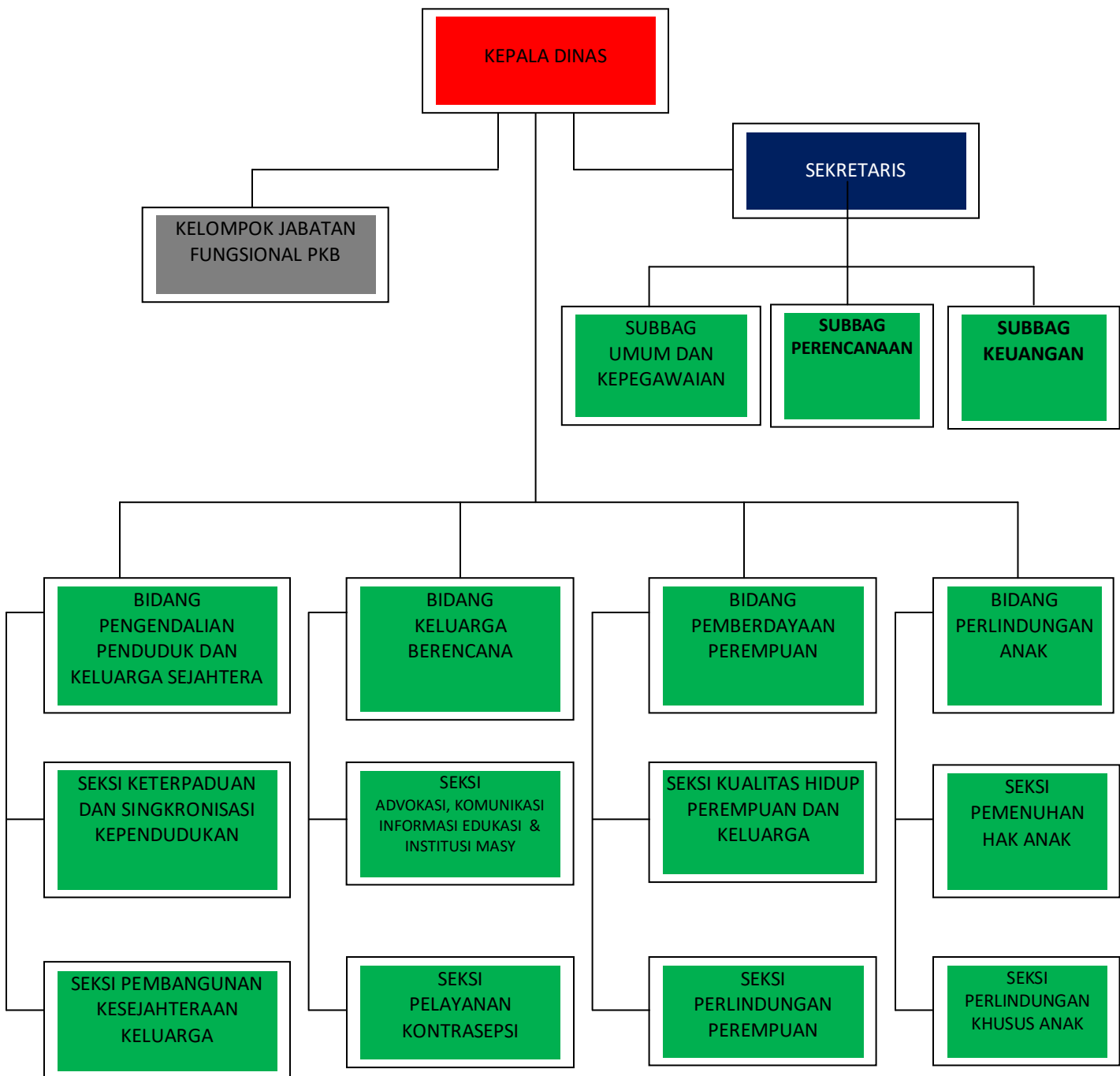
Berpedoman Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tatakerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan lainnya yang diberikan kepala daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. perumusan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tergambar pada Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas PPKBPPPA

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perumusan permasalahan perangkat daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dimasa datang.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah. Hal ini untuk menjamin konsistensi serta sinergitas perangkat daerah antar wilayah dan antara pusat dan daerah, yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) kabupaten, provinsi, dan nasional dalam proses perumusannya

Identifikasi permasalahan perangkat daerah dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum optimalnya organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP);
- b. Meningkatkan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif;
- c. Belum optimalnya kelompok kegiatan ketahanan keluarga.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan meningkatkan umur harapan hidup, harapan lama sekolah dan pendapatan per kapita perempuan;
- b. Belum optimalnya peran perempuan dalam pemerintahan;
- c. Belum optimalnya tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak terkait dengan status kota layak anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Laporan Kinerja Pemerintahan (LAKIP) atau Laporan Kinerja (LKj) Triwulan 1 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

^{d.} Laporan Kinerja (LKj) Triwulan 1 SKPD ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dalam laporan kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka

mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja-SKPD.

^{e.} Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah / perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (*Good Government*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (RPJMD 2018-2023).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dengan penetapan/kebijakan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melalui tahapan-tahapan hasil rumusan bersama seluruh komponen/unit kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan dokumen kerja SKPD yang memuat program dan kegiatan serta target dan indikator yang hendak dicapai untuk periode 1 (satu) tahun .

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi dan kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian

tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Berpedoman isu strategis RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, khususnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program pimpinan perangkat daerah dan pembangunan perangkat daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan perangkat daerah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan. Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis. Dimana berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri sampai pada tahun 2017 teridentifikasi bahwa beberapa kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi

dengan optimal. Pada urusan kesehatan beberapa permasalahan juga masih perlu untuk diperhatikan. Seperti halnya kualitas pelayanan kesehatan yang masih belum optimal dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini dapat terlihat dengan tingginya usia kawin pertama kurang dari 20 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kondisi-kondisi tersebut tentu memberikan *pressure* tersendiri terhadap pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga pembangunan manusia mengalami perlambatan. Dengan demikian maka, perwujudan aksesibilitas serta kualitas pelayanan di bidang kesehatan perlu untuk dikedepankan mengingat sumber daya manusia yang baik merupakan wujud nyata dari cita-cita UUD 1945 yaitu kesejahteraan masyarakat.

2. Peningkatan Optimalnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Wawasan Lingkungan
Peran strategis pembangunan level *bottom* banyak diakomodir Desa, garda terdepan pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat adalah desa, sehingga kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan karakter dan pondasi perekonomian serta peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan masih belum berjalan optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya kapasitas kelembagaan di desa sehingga kualitas pengelolaan desa menjadi tidak begitu efektif dan efisien. Oleh karena itu, perluasan jangkauan pelayanan melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar perlu untuk diupayakan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Jika memperhatikan data, isu perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender mengalami progress positif. Momentum positif terjadi khususnya pada peningkatan penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan semakin meningkatnya peran perempuan dalam organisasi dan pembangunan. Hal ini memberikan sinyal positif bahwa perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender mendapat respon positif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kondisi ini tentu harus dipertahankan dan perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga momentum positif tersebut dapat *sustain* dan semakin berkualitas.

3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis

Tuntutan pembangunan modern memaksa perangkat daerah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit. Sampai pada tahun 2019, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum berjalan optimal. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih. Inilah sebabnya mengapa pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih perlu untuk ditingkatkan.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Hulu Sungai Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah urusan Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Predikat AKIP	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA
				Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	<p>Alasan Pemilihan : Persentase rata-rata usia kawin pertama masuk dalam indikator kinerja adalah dalam rangka melaksanakan program KB serta pengendalian penduduk dengan sasaran para remaja untuk tidak kawin muda / pendewasaan usia perkawinan (PUP)</p> <p>Cara Perhitungan Indikator : $\frac{\text{Jumlah wanita kawin pertama usia } < 20 \text{ tahun}}{\text{Jumlah total perkawinan}} \times 100\%$</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Bidang KB - Laporan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
4	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>Alasan Pemilihan : IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan yang diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan gender. Dengan IPG dapat mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.</p> <p>Cara Perhitungan Indikator : $IPG = 1/3 (X EDE(1) + X EDE(2) + I inc-dis)$</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Bidang Pemberdayaan Perempuan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA
			Keterangan : X EDE(1) = X EDE untuk harapan hidup I inc-dis = Indeks distribusi penghasilan	
		Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	<p>Alasan Pemilihan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat 2 UUD Negara RI tahun 1945); 2. UU NO. 35 th 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Permen Pemberdayaan Perempuan No. 13 th 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan <p>Cara Perhitungan Indikator : $\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$</p>	Laporan Bidang Perlindungan Anak

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah (*top-down*) dan ke samping (*horizontal-diagonal*) dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*);
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Hulu Sungai Selatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAB. HULU SUNGAI SELATAN

2.2.1 SEKRETARIAT (URUSAN LAYANAN/PENUNJANG RUTIN)

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Predikat AKIP	Predikat	81,89 (A)	0	0	0	81,89 (A)
		1 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Persen	100 %		100%		100%
		1.1 Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	5	9	12	15
		1.2 Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	8	10	11	12

Pada tabel 2.2, dapat dijelaskan bahwa sekretariat merupakan urusan layanan/urusan rutin. Dimana tujuan merupakan Misi 5 (lima) dari RPJMD 2018 – 2023. Yang dari Indeks Reformasi Birokrasi target sebesar 23,50. Untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendukung hasil dari Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu Nilai / Predikat AKIP sebesar 81,89. Dengan Perjanjian Kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 1 program yaitu Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 2 (dua) kegiatan yaitu : Penyusunan Dokumen AKIP sebanyak 15 (sebelas) dokumen dan Penyusunan Dokumen Keuangan sebanyak 12 (dua belas) dokumen.

Aspek pemenuhan dokumen-dokumen AKIP yaitu :

Nama Dokumen		Jumlah
1	Renstra	1 dokumen
2	Berita Acara Reviu Renstra	1 dokumen
3	Cascading Kinerja Tahun 2019	1 dokumen
4	Renja 2019 (Murni, Perubahan)	2 dokumen
5	IKU + SK 2019	1 dokumen
6	PK Murni 2019 Ess II s.d Ess IV Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
7	PK Perubahan 2019 Ess II s.d Ess IV Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
8	Rencana Aksi 2019	1 dokumen
9	Capaian Kinerja Triwulan Th. 2019	4 dokumen
10	Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2019	1 dokumen
11	Peta Strategi & Struktur Organisasi serta Template Format Keselarasan Kinerja	1 dokumen
Jumlah		15 dokumen

Untuk Aspek pemenuhan dokumen-dokumen AKIP, pemasangan ditarget di triwulan diambil berdasarkan dokumen berurutan. Dan pada triwulan 1 mempunyai target lebih besar dibandingkan dengan triwulan lain yaitu 10, dikarenakan penyusunan dokumen inti seperti Renstra, Renja, Dokumen Cascading, SK IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan dokumen pendukung lainnya terlebih dahulu dibuat, karena sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan yaitu :

Nama Dokumen		Jumlah	
1	Renstra	1	dokumen
2	Renja	1	dokumen
3	RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan	2	dokumen
4	PRA RKA Murni dan Perubahan	2	dokumen
5	RKA Murni	1	dokumen
6	RKA Perubahan	1	dokumen
7	DPA	1	dokumen
8	Laporan Triwulan	1	dokumen
9	Laporan Prognosis Semesteran 1	1	dokumen
10	Laporan Tahunan (CALAK)	1	dokumen
Jumlah		12	dokumen

Sedangkan untuk Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan, pemasangan di target di triwulan diambil berdasarkan dokumen berurutan. Dan pada triwulan 1 mempunyai target lebih besar dibandingkan dengan triwulan lain yaitu 8, dikarenakan penyusunan dokumen inti seperti Renstra, Renja, RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan, Dokumen PRA RKA Murni dan Perubahan, RKA Murni, DPA, Laporan Triwulan, terlebih dahulu dibuat, karena sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari segi keuangan dan pelaksanaan kegiatan.

2.2.2 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	12	13	14
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
Menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun			Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia ≤ 20 tahun	Persen	73,02	0	0	0	73,02
	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja		Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	Persen	73,02	0	0	0	73,02
		Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	Persen	10	2,5	5,0	7,5	2,5
			Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Persen	78,89	70	75	78,9	78,99
		Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah remaja teradvokasi dan menerima Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja	orang	357	140	257	307	357
		Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	PUS	34.612	34.312	34.412	34.512	34.812

Tujuan	Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2		5	6	7	10	11	12	13	14
			Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	Persen	60,2	50,17	53,51	56,86	21,08
				Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK	Persen	18,18		9,09		18,18
			Pembinaan kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	kelompok	180	150	160	170	180
			Penyusunan data kependudukan dan keluarga	Jumlah instansi KB yang menyelenggarakan program KKBPK	buah	2	0	1	0	2

Pada tabel 2.2.2 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dijelaskan bahwa tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun. Sebagai alur pendukung dari tujuan Dinas maka disusun program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu:

1. Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan target:
 - a. Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan sebesar 10% dan,
 - b. Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif sebesar 78,89 %
2. Program Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan target:
 - a. Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif sebesar 60,2 %, dan
 - b. Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK sebesar 18,18 %

Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) mempunyai 2 kegiatan yaitu:

- 1) Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan target 357 orang, target triwulan I sebanyak 140 orang, target triwulan II sebanyak 257 orang, target triwulan III sebanyak 307 orang dan target triwulan IV sebanyak 357 orang. Target pada triwulan adalah hasil kumulatif pada tiap triwulan.
- 2) Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dengan target 34.612 PUS, target triwulan I sebanyak 34.312 PUS, target triwulan II sebanyak 34.412 PUS, target triwulan III sebanyak 34.512 PUS dan target triwulan IV sebanyak 34.612 PUS. Target pada triwulan adalah hasil kumulatif pada tiap triwulan.

Program Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai 2 kegiatan yaitu:

- 1) Pembinaan kelompok kegiatan ketahanan keluarga dengan target 180 kelompok, target triwulan I sebanyak 150 kelompok, target triwulan II sebanyak 160 kelompok, target triwulan III sebanyak 170 kelompok, dan target triwulan IV sebanyak 180 kelompok. Target pada triwulan adalah hasil kumulatif pada tiap triwulan.

- 2) Penyusunan data kependudukan dan keluarga dengan target 2 instansi, dilaksanakan pada triwulan II dan triwulan IV. Target pada triwulan IV adalah hasil komulatif pada tiap triwulan.

2.2.3. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	12	13	14
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pangarusutamaan gender serta perlindungan anak			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,27	0	0	0	90,27
	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,27	0	0	0	90,27
			Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	Persen	2,03	0,67	1,35	0	2,03
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	Persen	36,84	0	36,84	0	0
		Pelaksanaan PUG di tingkat daerah	Jumlah SKPD yang perencanaan dan penganggaran responsif gender	SKPD	10	0	10	0	0

			Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	Persen	8,11	0	5,95	8,11	0
			Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	Jumlah organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang dibina	organisasi	6	0	3	6	0
			Program Peningkatan Pelindungan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
			Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Jumlah PATBM desa yang aktif	buah	2	0	1	0	2
			Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak berbasis kluster	Persen	27,78	5,56	5,56	7,41	9,26
			Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah indikator yang terpenuhi	kluster	15	3	3	4	5

Pada tabel 2.2.3 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pangarusutamaan gender serta perlindungan anak. Sebagai alur pendukung dari tujuan Dinas maka disusun program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan target:
Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender sebesar 36,84%,
2. Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan dengan target:
Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif sebesar 8,11 %,
3. Program Peningkatan Perlindungan Anak dengan target:
Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan 100 %, dan
4. Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dengan target:
Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layan anak berbasis kluster sebesar 27,78%.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender (PUG) dengan target 10 SKPD dimana kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II. Adapun 10 SKPD yang menjadi target adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian, dan Dinas Sosial

Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dengan target 6 organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang akan dilaksanakan pada triwulan II dan pada

triwulan III. Organisasi perempuan yang akan dibina yaitu Dharma Wanita Persatuan Kab. HSS, Gabungan Isteri Wakil Rakyat (GATRIWARA) Kab. HSS, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. HSS, Muslimat NU, Salimah, dan Katalia.

Program Peningkatan Perlindungan Anak mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan target 2 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) desa yang aktif, dimana akan dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II dengan masing-masing 1 PATBM desa yang aktif.

Program Peningkatan Perlindungan Anak mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan target 2 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) desa yang aktif, dimana akan dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II dengan masing-masing 1 PATBM desa yang aktif.

Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan Pemenuhan Hak Anak dengan target 15 indikator yang terpenuhi, target triwulan I sebanyak 3 indikator, target triwulan II sebanyak 3 indikator, target triwulan III sebanyak 4 indikator dan target triwulan IV sebanyak 5 indikator.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK), juga tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Dengan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan tujuan dan sasaran.

Pada bab ini akan disajikan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target Triwulan I serta realisasi anggaran Triwulan I (satu) tahun 2019.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka tujuan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran seperti pada tabel berikut.

TABEL 3.1

PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT TRIWULAN I

Tujuan	Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)				
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2		5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50								
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			Predikat AKIP	Predikat	81,89 (A)	0	0	0	81,89 (A)	0								
		1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Persen	79,8	0	0	0	81,46	0								
				Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Persen	100%	66,67%	83,33%	91,66%	100%	66,67%				100 %				
		1.1	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	5	9	12	15	5				100 %				
		1.2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	3	6	9	12	3				100 %				
		2	Program Pelayanan Administrasi	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100				100 %				

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Perkantoran														
		2.1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun				100 %		
		2.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun				100 %		
		2.3	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0	0	0,50 tahun	1 tahun	0				0		
		2.4	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun				100 %		
		2.5	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun				100 %		
		2.6	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun				100 %		
		3	Program Peningkatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100				100 %		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Sarana dan Prasarana Aparatur														
		3.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	tahun	1 tahun	0,5 tahun	1 tahun	0	0	0,5 tahun				100 %		
		3.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun				100 %		
		3.3	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun				100 %		
		4	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100				100 %		
		4.1	Pembinaan Program KBKR	Jumlah kegiatan KBKR	kegiatan	5 kegiatan	2 kegiatan	4 kegiatan	5 kegiatan	0	2 kegiatan	4 kegiatan			100 %		
		4.2	Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	Jumlah kegiatan ketahanan keluarga	kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	0	3 kegiatan	0	2 kegiatan	0			100 %		

Tujuan	Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2		5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat	kegiatan	5 kegiatan	1 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan	5 kegiatan	1 kegiatan	3 kegiatan			100 %			
		4.3	Partisipasi Anak	Jumlah kegiatan partisipasi anak	kegiatan	2 kegiatan	0	0	2 kegiatan	0	0	0			100 %			

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, pencapaian kinerja urusan kesekretariatan, sebagai tujuan sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada triwulan 1 ini realisasi yang ada tidak bisa dilaporkan sebagai laporan Realisasi sasaran karena bentuknya kegiatan selama setahun, sehingga output/keluaran akan disampaikan pada triwulan 4 (empat). Pada tabel diatas mempunyai program utama sebanyak 1 program dengan kegiatan utama 2 buah. Untuk kegiatan rutin program pendukung terdapat 3 buah dan kegiatan pendukung sebanyak 13 buah yang dilaksanakan sesuai rutin pengelolaan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan yang terkait dengan Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Indikator Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah dengan kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP dan Penyusunan Dokumen Keuangan.

Pada indikator kinerja sasaran pertama Indeks Reformasi Birokrasi hasil capaian kami target Triwulan 4 namun masih belum bisa diukur karena masih tahap persiapan kegiatan. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak melakukan pelayanan publik langsung, melainkan Indeks Reformasi Birokrasi yang diukur adalah pelayanan rutin Sekretariat kepada bidang-bidang baik dalam hal urusan ketatausahaan maupun urusan kepegawaian. Sedangkan indikator kinerja sasaran yang kedua yaitu Nilai/Peringkat AKIP hasil capaian juga kami target pada triwulan 4 masih belum bisa diukur karena hasil penilaian evaluasi Laporan AKIP oleh Kemenpan RB dilakukan pada triwulan 4.

Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, memiliki target kegiatan 37,04% atau jumlah 10 dokumen dari total jumlah 27 dokumen, dimana 15 untuk Dokumen Penyusunan AKIP dan 12 Dokumen dari penyusunan Dokumen Keuangan. Dari Kegiatan

Penyusunan AKIP, telah dilaksanakan sebanyak 7 di Triwulan I yaitu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

	Nama Dokumen		Jumlah
1	Renstra	1	dokumen
2	Renja 2019 (Murni)	1	dokumen
3	IKU + SK 2019	1	dokumen
4	Cascading 2019)	1	dokumen
5	PK Murni 2019 S.D Ess Iv Dan Jabatan Fungsional (Pelaksana)	1	dokumen
6	Pra RKA 2020	1	dokumen
7	Capaian Kinerja Triwulan Th. 2019	1	dokumen
	Jumlah	7	dokumen

Sedangkan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan, pada Triwulan 1 sebanyak 3 Dokumen yaitu Dokumen CALK, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dan Laporan Prognosis.

Pada indikator kinerja program kami target di tiap triwulan pada aspek pemenuhan dokumen untuk kegiatan pelaporan AKIP yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan dan Akhir Tahun, serta aspek pemenuhan dokumen untuk pelaporan keuangan yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan, Semester dan Akhir.

Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di targetkan pada triwulan I 5 kegiatan dari 6 kegiatan yang ada dan sudah dilaksanakan 5 kegiatan dengan capaian 100 % yaitu kegiatan penyediaan jasa dan administrasi perkantoran, kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan penyediaan makan dan minuman, kegiatan rapat-rapat koordinasi, konsultasi dengan lapangan serta kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya.

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di targetkan pada triwulan I 3 kegiatan dan sudah dilaksanakan 3 kegiatan dengan capaian 100 % yaitu kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dan kegiatan pemerliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Pada Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah di targetkan pada triwulan I 3 kegiatan dari 4 kegiatan dan sudah dilaksanakan 3 kegiatan dengan capaian 100 % yaitu kegiatan pembinaan program KBKR, kegiatan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga serta kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat.

TABEL 3.2
PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
Menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun			Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia ≤ 20 tahun	Persen	73,02	0	0	0	73,02	0				0			
	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja		Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	Persen	73,02	0	0	0	73,02	0				0			
		Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	Persen	10	2,5	5,0	7,5	10	2,5				100 %			
			Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Persen	78,89	78,40	78,65	78,9	78,99	78,40				100 %			
		Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi	Jumlah remaja teradvokasi dan menerima Komunikasi, Informasi dan Edukasi	orang	357	140	257	307	357	201				143,7 %			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
		Remaja (KRR)	Kesehatan Reproduksi Remaja														
		Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	PUS	34.612	34.312	34.412	34.512	34.812	37.238				108,29%			
		Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK FISIK)	Jumlah Balai KKB Kecamatan	Balai KKB Kec	11	4	8	11	11	0				0			
		Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK NF)	Jumlah balai KKB Kec. yang mendapat dukungan operasional keg. program KKBPK	Balai KKB Kec	11	4	8	11	11	4				100%			
		Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan (DAK NF)	Jumlah faskes keluarga berencana yang mendapatkan bantuan alat dan obat kontrasepsi (Alokon)	Faskes KB	26	9	18	26	26	9				100%			
		Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB (DAK NF)	Jumlah kampung KB yang mendapat dukungan integrasi program KKBPK dan program lainnya	Kampung KB	22	7	14	22	22	0				0			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK NF)	Kader PPKBD	148	50	100	148	148	50				100%			
			Jumlah kader Sub PPKBD di desa yang mendapat dukungan program KKBPB	Kader Sub PPKBD													
			Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK NF)	buah	11	4	8	11	11	4				100%			
			Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persen	60,2	50,17	53,51	56,86	60,20	48,13				95,93 %			
			Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPB	Persen	18,18	0	9,09	0	18,18	0				0			
			Pembinaan kelompok kegiatan ketahanan keluarga	kelompok	180	150	160	170	180	150				100 %			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Penyusunan data kependudukan dan keluarga	instansi	2	0	1	0	2	3				100 %			

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, pencapaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sebagai tujuan sasaran strategis yaitu menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada triwulan 1 ini realisasi yang ada tidak bisa dilaporkan sebagai laporan Realisasi sasaran karena bentuknya kegiatan selama setahun karena merupakan hasil Survey Susenas, sehingga output/keluaran akan disampaikan pada triwulan 4 (empat). Pada tabel diatas mempunyai 2 program yaitu Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan Program Peningkatan Keluarga Sejahtera.

Pada Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) memiliki 2 indikator kinerja program yaitu Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan yang mana pada triwulan I ditargetkan 3 organisasi dan sudah terealisasi 3 organisasi dengan capaian 100%, dan pada indikator Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif pada triwulan I ditargetkan 78,40 % PUS dan sudah terealisasi 78,40% dengan capaian 100%. Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif berasal dari jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 37,238 dan jumlah PUS sebesar 47.498 (Data capaian berasal dari laporan Statistik Rutin BKKBN). Untuk pencapaian program tersebut ada 8 kegiatan dengan 2 kegiatan yang bersumber pada Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan sasaran remaja/anak berusia 15-19 tahun yang diberikan sosialisasi dan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan dan kegiatan Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dengan sasaran Pasangan Usia Subur, serta 6 kegiatan yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pada Program Peningkatan Keluarga Sejahtera memiliki 2 indikator kinerja program yaitu persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif dan persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK. Pada indikator persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif pada triwulan I ditargetkan 50,17% kelompok kegiatan, akan tetapi pada triwulan I ini hanya terealisasi 48,13 % dengan capaian kinerja sebesar 95,93 %. Sedangkan pada persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan

sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK belum terealisasi dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan II. Akan tetapi untuk mendukung indikator ini pada triwulan I sudah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi teknis bulanan bidang PPKS yang diikuti oleh Bidang Keluarga Berencana dan seluruh PKB se-Kab HSS, memonitor laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan, meentry data laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan dan membuat laporan bulanan hasil dari laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan.

Tabel 3.3

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pangarusutamaan gender serta perlindungan anak			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,98	0	0	0	89,98	0				0	0		
	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,96	0	0	0	90,58	0				0	0		
			Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	Persen	2,03	0,67	1,35	0	2,03	0,67				100 %	100 %		
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	Persen	36,84	0	36,84	0	0	0				100 %	100 %		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Pelaksanaan PUG di tingkat daerah	SKPD	10	0	10	0	0	0				100 %			
			Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Persen	8,11	0	5,95	8,11	0	0				100 %			
			Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	organisasi	6	0	3	6	0	0				100 %			
			Program Peningkatan Pelindungan Anak	Persen	100	100	100	100	100	100				100 %			
			Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	buah	2	0	1	0	2	0				100 %			
			Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persen	27,78	5,56	5,56	7,41	9,26	5,56				100 %			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
		Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah indikator yang terpenuhi	kluster	15	3	3	4	5	3				100 %			

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, pencapaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai tujuan sasaran strategis yaitu meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pangarusutamaan gender serta perlindungan anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada triwulan 1 ini ada realisasi yang tidak bisa dilaporkan sebagai laporan Realisasi sasaran karena bentuknya kegiatan selama setahun karena merupakan hasil Survey dari BPS, sehingga output/keluaran akan disampaikan pada triwulan 4 (empat). Pada tabel diatas mempunyai 4 program yaitu Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan, Program Peningkatan Perlindungan Anak dan Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

Pada program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan mempunyai indikator kinerja program Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender yang mana pada triwulan I belum terealisasi dikarenakan kegiatan dijadwalkan pada triwulan II.

Untuk Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan mempunyai indikator kinerja program yaitu Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif yang mana pada triwulan I belum ada realisasi dikarenakan target pencapaian dijadwalkan pada triwulan II. Akan tetapi untuk mendukung indikator tersebut pada triwulan I dilaksanakan sosialisasi perlindungan dalam rumah tangga serta pendampingan pelaksanaan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang melaporkan atau pun yang terdata.






Program Peningkatan Perlindungan Anak mempunyai indikator kinerja program persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan, dimana pada triwulan I ini ditargetkan 100% dan sudah terealisasi 100% dengan jumlah kasus anak yang dilaporkan 5 kasus dan sudah diselesaikan 5 kasus. Untuk mendukung penurunan kasus pada anak dibentuk Tim Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak dengan anggota antara lain terdiri dari Jaksa anak, Pengacara, Kepolisian, RUTAN, Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, Kemenag, Peksos/Dinas Sosial, terlaksananya sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

(PATBM) yang mana pada triwulan I masih tahap pembinaan pada salah satu PATBM untuk menjadi PATBM yang aktif.





Pada program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai indikator kinerja program yaitu Tingkat pemenuhan aspek Desa/Kelurahan Layak Anak berbasis Klaster, dimana pada triwulan I ditargetkan 5,56 % dan sudah terealisasi 5,56% dengan perhitungan 3 indikator sudah terealisasi pada triwulan I dari 15 indikator dengan capaian kinerja 100%. Untuk mendukung pencapaian tersebut sudah dilaksanakan Pembinaan pada Desa/Kelurahan yang menginisiasi menjadi Desa/kelurahan Layak Anak, Pembinaan Puskesmas dengan pelayanan ramah anak, Terbinanya Sekolah yang menginisiasi menjadi Sekolah Ramah Anak, Terlaksananya Rapat evaluasi Kabupaten Layak Anak dan Terlaksananya kegiatan forum anak di Kab. HSS.

Dari keseluruhan hasil capaian kinerja urusan/bidang terkait yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, rangkuman capaian dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2019
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KAB. HSS

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan	Status	Keterangan
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50		
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Predikat AKIP	Predikat	81,89 (A)	0	0	0	81,89 (A)	0		Capaian target di akhir (TW IV)
Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	Persen	73,02	0	0	0	73,02	0		Capaian target di akhir (TW IV)
Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,96	0	0	0	90,58	0		Capaian target di akhir (TW IV)
	Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	Persen	2,03	0,67	1,35	0	2,03	0,67		

Keterangan:

-  Capaian > 100 %
-  Capaian > 90% - 100 %
-  Capaian > 75% - 90 %
-  Capaian < 50 %

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas, indikator sasaran yang pertama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi pencapaian realisasi sama dengan target atau dengan kata lain tercapai 100%, begitu juga indikator sasaran ke 5 (lima) yaitu Persentase desa/kelurahan layak anak pencapaian kinerjanya 100% dikarenakan pada triwulan I masih dalam proses pembinaan untuk desa/kelurahan layak anak.

Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran ke dua yaitu predikat AKIP realisasi ditargetkan pada triwulan IV karena pada triwulan tersebut baru akan dilakukan penilaian oleh Inspektorat. Untuk indikator ke 3 (tiga) dan 4 (empat) yaitu persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunggu hasil survey dari Susenas untuk indikator ke 3 dan hasil survey dari Badan Pusat Statistik (BPS)

3.2. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini akan diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Di dalamnya terdapat alokasi anggaran, realisasi keuangan, persentasi capaian dan sisa anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2019 yang diambil dari Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Total Pagu Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp. 6.225.505.700,00 dan Realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2019 Bidang Keluarga Berencana sebesar Rp. 118.875.500,00, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp. 1.980.000,00, Bidang Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 1.31.000,00, Bidang Perlindungan Anak sebesar Rp. 7.188.690,00, dan Sekretariat sebesar Rp. 238.842.314,00. Adapun rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN 2019
BERDASARKAN URUSAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KAB. HSS

1. Kesekretariatan (layanan penunjang perangkat daerah)

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1.475.551.750	540.793.200	408.322.450	263.591.750	262.844.350	238.842.314	0	0	0	36,65%	27,67%	17,86%	17,81%	16,19%	0	0	0,00%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	599.432.850	153.880.300	143.081.100	145.130.300	157.341.150	53.093.922	0	0	0	25,67	23,87	24,21%	26,25%	8,86%	0	0	0,00%
Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	44.545.200	11.324.500	11.074.500	11.074.500	11.071.700	10.483.400	0	0	0	25,42%	24,86%	24,86%	24,85%	23,53%	0	0	0,00%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	63.600.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	5.787.983	0	0	0	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	9,10%	0	0	0,00%
Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	14.000.000	0	0	2.700.000	11.300.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	19,29%	80,71%	0,00%	0	0	0,00%
Penyediaan makanan dan minuman	28.104.000	10.700.800	5.001.600	3.700.800	8.700.800	2.760.000	0	0	0	38,08%	17,80%	13,17%	30,96%	9,82%	0	0	0,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekni	45.850.000	15.125.000	10.275.000	10.925.000	9.525.000	9.150.000	0	0	0	32,99%	22,41%	23,83%	20,77%	19,96%	0	0	0,00%

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
s Lainnya																	
Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	403.333.650	100.830.000	100.830.000	100.830.000	100.843.650	24.912.539	0	0	0	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	6,18%	0	0	0,00%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	242.829.000	165.729.000	25.700.000	25.700.000	25.700.000	39.368.492	0	0	0	68,25%	10,58%	10,58%	10,58%	16,21%	0	0	0,00%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	80.239.000	80.239.000	0	0	0	32.306.000	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,26%	0	0	0,00%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	94.520.000	23.645.000	23.625.000	23.625.000	23.625.000	6.312.492	0	0	0	25,02%	24,99%	24,99%	24,99%	6,68%	0	0	0,00%
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	68.070.000	61.845.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	750.000	0	0	0	90,86%	3,05%	3,05%	3,05%	1,10%	0	0	0,00%
Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.610.000	2.206.500	2.401.500	2.606.500	1.440.000	477.500	0	0		22,96%	24,99%	27,12%	24,93%	4,97%	0	0	0,00%
Penyusunan Dokumen Keuangan	4.700.000	1.129.000	1.124.000	1.329.000	1.118.000	0	0	0	0	24,02%	23,91%	28,28%	23,79%	0,00%	0	0	0,00%
Penyusunan Dokumen AKIP	4.910.000	1.077.500	1.277.500	1.277.500	1.277.500	477.500	0	0	0	21,95%	26,02%	26,02%	26,02%	9,73%	0	0	0,00%
Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	623.679.900	218.977.400	237.139.850	90.154.950	77.407.700	145.902.400	0	0	0	35,11%	38,02%	14,46%	12,41%	23,39%	0	0	0,00%
Pembinaan Program KBKR	54.937.900	43.837.900	5.900.000	5.200.000	0	745.000	0	0	0	79,80%	10,74%	9,47%	0,00%	1,36%	0	0	0,00%

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	56.076.700	35.880.700	600.000	19.396.000	200.000	10.900.000	0	0	0	63,99%	1,07%	34,59%	0,36%	19,44%	0	0	0,00%
Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	483.315.300	139.258.800	230.639.850	36.208.950	77.207.700	134.257.400	0	0	0	28,81%	47,72%	7,49%	15,97%	27,78%	0	0	0,00%
Partisipasi Anak	29.350.000	0	0	29.350.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0	0	0,00%

Pada tabel 3.6, untuk kesekretariatan, Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (Sekretariat). Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan pagu dana sebesar Rp. 9.610.000,- , dengan target triwulan I sebesar Rp. 2.206.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 477.500,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 22,96% dan capaian realisasi keuangan sebesar 4,97%.

Kemudian untuk Program Pelayanan Administrasi Kantor, dengan pagu Rp. 599.432.850,-. dengan target triwulan I sebesar Rp. 153.880.300,-. dan realisasi keuangan sebesar Rp. 53.093.922,-, sehingga capaian target rencana belanja sebesar 25,67% dan capaian realisasi keuangan sebesar 8,86%. Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan pagu Rp. 242.829.000,-. dengan target triwulan I sebesar Rp. 165.729.000,-. dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.368.492,-, sehingga capaian target rencana belanja sebesar 68,25 % dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 16,21% .

Pada Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan program “sapu jagad” dimana kegiatan yang ada pada program ini merupakan kegiatan yang ada pada masing-masing bidang yang tidak mempunyai indikator khusus. Adapun pagu pada program ini sebesar Rp. 623.679.900,00 dengan target pada triwulan I Rp. 218.977.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 145.902.400 sehingga capaian target rencana belanja sebesar 35,11% dan capaian realisasi keuangan sebesar 23,39%.

2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	4.584.721.150	417.902.000	2.303.666.640	1.134.136.210	729.016.300	120.855.500	0	0	0	9,12%	50,25%	24,74%	15,90%	2,64%	0	0	0,00%
Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja	4.51.712.500	409.739.50	2.270.091.390	1.121.991.210	719.890.400	118.875.500	0	0	0	9,06%	50,20%	24,81%	15,92%	2,63%	0	0	0,00%
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	39.978.600	13.815.000	19.332.000	6.831.600	0	12.575.500	0	0	0	34,56%	48,36%	17,09%	0,00%	31,46%	0	0	0,00%
Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	259.507.900	69.281.500	72.428.000	70.586.500	47.211.900	56.800.000	0	0	0	26,70%	27,91%	27,20%	18,19%	21,89%	0	0	0,00%
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK)	1.085.159.000	0	1.085.159.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0,00%
Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK NF)	955.796.460	99.295.000	358.766.460	287.985.000	209.750.000	49.500.000	0	0	0	10,39%	37,54%	30,13%	21,95%	5,18%	0	0	0,00%
Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan (DAK NF)	40.500.000	4.500.000	13.500.000	13.500.000	9.000.000	0	0	0	0	11,11%	33,33%	33,33%	22,22%	0,00%	0	0	0,00%
Operasional Penggerakan Program KKBPK di	985.600.000	109.515.000	328.585.000	328.500.000	219.000.000	0	0	0	0	11,11%	33,34%	33,33%	22,22%	0,00%	0	0	0,00%

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Kampung KB (DAK NF)																	
Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK NF)	267.170.540	14.668.000	96.310.930	118.593.110	37.598.500	0	0	0	0	5,49%	36,05%	44,39%	14,07%	0,00%	0	0	0,00%
Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK NF)	888.000.000	98.665.000	296.010.000	295.995.000	197.330.000	0	0	0	0	11,11%	33,33%	33,33%	22,22%	0,00%	0	0	0,00%
Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	63.008.650	8.162.500	33.575.250	12.145.000	9.125.900	1.980.000	0	0	0	12,95%	53,29%	19,28%	14,48%	3,14%	0	0	0,00%
Pembinaan kelompok ketahanan keluarga	41.302.750	6.182.500	30.605.250	4.515.000	0	0	0	0	0	14,97%	74,10%	10,93%	0,00%	0,00%	0	0	0,00%
Penyusunan Data Kependudukan dan Keluarga	21.705.900	1.980.000	2.970.000	7.630.000	9.125.900	1.980.000	0	0	0	9,12%	13,68%	35,15%	42,04%	9,12%	0	0	0,00%

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang memiliki sasaran Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja didukung dengan 2 (dua) program yaitu Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dibawah koordinasi Bidang Keluarga Berencana dimana pagu pada program ini sebesar Rp. 4.521.712.500,- yang merupakan perpaduan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 299.486.500,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 4.222.226.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 409.739.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 118.875.500,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 9,06% dan capaian realisasi keuangan sebesar 2,63%.

Untuk program Peningkatan Keluarga Sejahtera dibawah koordinasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera memiliki pagu sebesar Rp. 63.008.650,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 8.162.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.980.000,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 12,95% dan capaian realisasi keuangan sebesar 3,14%.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	165.232.800	22.772.600	56.294.350	64.843.350	21.322.500	8.319.690	0	0	0	13,78%	34,07%	39,24%	12,90%	5,04%	0	0	0,00%
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	38.497.500	0	29.003.750	9.493.750	0	0	0	0	0	0,00%	75,34%	24,66%	0,00%	0,00%	0	0	0,00%
Pelaksanaan Manajemen PUG di tingkat	38.497.500	0	29.003.750	9.493.750	0	0	0	0	0	0,00%	75,34%	24,66%	0,00%	0,00%	0	0	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	10.045.000	2.262.500	3.912.500	2.632.500	1.237.500	1.131.000	0	0	0	22,52%	38,95%	26,21%	12,32%	11,26%	0	0	0,00%
Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	10.045.000	2.262.500	3.912.500	2.632.500	1.237.500	1.131.000	0	0	0	22,52%	38,95%	26,21%	12,32%	11,26%	0	0	0,00%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK	92.724.300	10.428.100	18.603.100	45.058.100	18.635.000	5.715.300	0	0	0	11,25%	20,06%	48,59%	20,10%	6,16%	0	0	0,00%
Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	92.724.300	10.428.100	18.603.100	45.058.100	18.635.000	5.715.300	0	0	0	11,25%	20,06%	48,59%	20,10%	6,16%	0	0	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN ANAK	23.966.000	10.082.000	4.775.000	7.659.000	1.450.000	1.473.390	0	0	0	42,07%	19,92%	31,96%	6,05%	6,15%	0	0	0,00%
Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	23.966.000	10.082.000	4.775.000	7.659.000	1.450.000	1.473.390	0	0	0	42,07%	19,92%	31,96%	6,05%	6,15%	0	0	0,00%

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang memiliki sasaran meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak didukung dengan 4 (empat) program yaitu Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dan Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dibawah koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Program Peningkatan Perlindungan Anak dibawah koordinasi Bidang Perlindungan Anak.

Pada Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan memiliki pagu sebesar Rp. 38.497.500,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 0,- dikarenakan kegiatan Pelaksanaan Manajemen PUG di tingkat daerah dijadwalkan pada triwulan II sehingga tidak ada realisasi keuangan. Untuk program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan memiliki pagu sebesar Rp. 10.045.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 2.262.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.131.000,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 4,66% dan capaian realisasi keuangan sebesar 2,33%.

Pada Bidang Perlindungan Anak terdapat Program Pemenuhan Hak Anak yang memiliki pagu sebesar Rp. 92.724.300,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 10.428.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.715.300,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 11,25% dan capaian realisasi keuangan sebesar 6,16% dan Program Peningkatan Perlindungan Anak yang memiliki pagu sebesar Rp. 23.966.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 10.082.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.473.390,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 42,07% dan capaian realisasi keuangan sebesar 6,15%.

Tabel 3.7
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN 2019
BERDASARKAN URUSAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KAB. HSS

Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator	REALISASI ANGGARAN (%)				REALISASI KINERJA (%)				REALISASI KINERJA (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
SEKRETARIAT													
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Predikat AKIP	16,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan Pelayanan	8,86	0	0	0	100	0	0	0	11,29	0	0	0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kepuasan Pelayanan	16,21	0	0	0	100	0	0	0	6,17	0	0	0
Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP; Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	4,97	0	0	0	55,67	0	0	0	11,20	0	0	0
Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan Pelayanan	23,39	0	0	0	100	0	0	0	4,28	0	0	0
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	2,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	2,63	0	0	0	2,5	5,0	0	0	0,95	0	0	0

Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator	REALISASI ANGGARAN (%)				REALISASI KINERJA (%)				REALISASI (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
	Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	2,63	0	0	0	78,40	0	0	0	29,81	0	0	0
Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	3,14	0	0	0	50,17	0	0	0	15,98	0	0	0
	Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK	3,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,19	0	0
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	5,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	5,04	0	0	0	0,67	0	0	0	0,13	0	0	0
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program peningkatan perlindungan hak perempuan	Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	11,26		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	6,16	0	0	0	5,56	0	0	0	0,9	0	0	0
Program peningkatan perlindungan anak	Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak berbasis klaster	6,15	0	0	0	100	0	0	0	16,26	0	0	0

BAB IV

PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Triwulan I ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Triwulan I ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang ingin di capai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100% dan 0% atau belum mencapai target;
- 2) Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0% atau belum mencapai target;
- 3) Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 0% dan 0,67% atau belum mencapai target;

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 3 (tiga) sasaran tersebut, mayoritas pencapaian sasaran belum mampu mencapai target dikarenakan pada triwulan I Tahun 2017 ini masih banyak kegiatan

yang belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu pada Triwulan IV (merupakan hasil sensus BPS dan Susenas).

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 6.225.505.700,00 sedangkan realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2017 sebesar Rp. 368.017.504,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 5,9%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 5.857.488.196,00.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan I Tahun 2019 ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kita semua khususnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sebagai gambaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada lintas sektor terkait lainnya baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 1 April 2019

Kepala Dinas PPKBPPPA



Drs. Hj. Is Susilastuti

Pembina Utama Muda

NIP. 19601219 198503 2 006



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis	8
2.2 Indikator Kinerja Utama	11
2.3 Perjanjian Kinerja	15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	27
3.2 Realisasi Anggaran	47

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

2.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	12
2.2	Perjanjian Kinerja Dinas PPKBPPPA	16
3.1	Pencapaian Kinerja Sekretariat Triwulan I	28
3.2	Pencapaian Kinerja Triwulan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34
3.3	Pencapaian Kinerja Triwulan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40
3.4	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019 Dinas PPKBPPPA	46
3.5	Capaian Realisasi Keuangan Triwulan I Kesekretariatan Tahun 2019	48
3.6	Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Triwulan	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, maka pembagian urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mencakup :

1. Sub Bidang Pengendalian Penduduk, yakni: a) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, b) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota.
2. Sub Bidang Keluarga Berencana, yakni: a) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local, b) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), c) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota, d) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
3. Sub Bidang Keluarga Sejahtera, yakni: a) Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, b) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Sedangkan pembagian urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup :

1. Sub Bidang Kualitas Hidup Perempuan, yakni: a) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota, b) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota, c)

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.

2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan, yakni: a) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota, b) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota, c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota,
3. Sub Bidang Kualitas Keluarga, yakni: a) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota, b) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota, c) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota,
4. Sub Bidang Sistem Data Gender dan Anak, yakni Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.
5. Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA), yakni: a) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota, b) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota,
6. Sub Bidang Perlindungan Khusus Anak, yakni: a) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota, b) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota, c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:



Penetapan rencana strategis program dan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan lainnya yang diberikan kepala daerah



Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas PPKBPPPA



Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi



Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas PPKBPPPA



Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas PPKBPPPA

1.2 Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan dasar Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

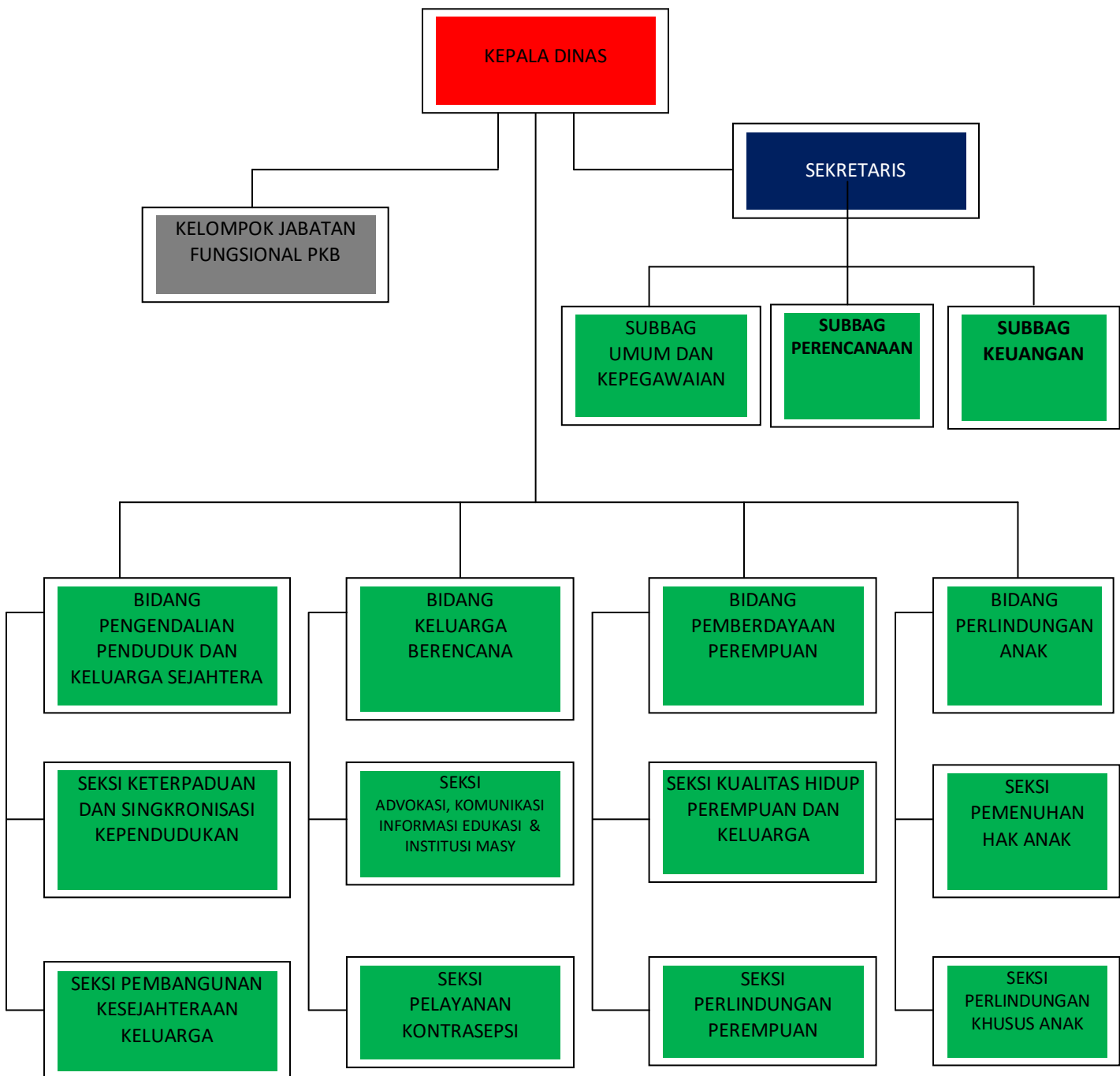
Berpedoman Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan lainnya yang diberikan kepala daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. perumusan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tergambar pada Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas PPKBPPPA

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perumusan permasalahan perangkat daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dimasa datang.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah. Hal ini untuk menjamin konsistensi serta sinergitas perangkat daerah antar wilayah dan antara pusat dan daerah, yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) kabupaten, provinsi, dan nasional dalam proses perumusannya

Identifikasi permasalahan perangkat daerah dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum optimalnya organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP);
- b. Meningkatkan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif;
- c. Belum optimalnya kelompok kegiatan ketahanan keluarga.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan meningkatkan umur harapan hidup, harapan lama sekolah dan pendapatan per kapita perempuan;
- b. Belum optimalnya peran perempuan dalam pemerintahan;
- c. Belum optimalnya tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak terkait dengan status kota layak anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Laporan Kinerja Pemerintahan (LAKIP) atau Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

^{d.} Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II SKPD ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dalam laporan kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka

mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja-SKPD.

^{e.} Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah / perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (*Good Government*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (RPJMD 2018-2023).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dengan penetapan/kebijakan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melalui tahapan-tahapan hasil rumusan bersama seluruh komponen/unit kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan dokumen kerja SKPD yang memuat program dan kegiatan serta target dan indikator yang hendak dicapai untuk periode 1 (satu) tahun .

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi dan kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian

tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Berpedoman isu strategis RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, khususnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program pimpinan perangkat daerah dan pembangunan perangkat daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan perangkat daerah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan. Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis. Dimana berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri sampai pada tahun 2017 teridentifikasi bahwa beberapa kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi

dengan optimal. Pada urusan kesehatan beberapa permasalahan juga masih perlu untuk diperhatikan. Seperti halnya kualitas pelayanan kesehatan yang masih belum optimal dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini dapat terlihat dengan tingginya usia kawin pertama kurang dari 20 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kondisi-kondisi tersebut tentu memberikan *pressure* tersendiri terhadap pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga pembangunan manusia mengalami perlambatan. Dengan demikian maka, perwujudan aksesibilitas serta kualitas pelayanan di bidang kesehatan perlu untuk dikedepankan mengingat sumber daya manusia yang baik merupakan wujud nyata dari cita-cita UUD 1945 yaitu kesejahteraan masyarakat.

2. Peningkatan Optimalnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Wawasan Lingkungan
Peran strategis pembangunan level *bottom* banyak diakomodir Desa, garda terdepan pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat adalah desa, sehingga kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan karakter dan pondasi perekonomian serta peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan masih belum berjalan optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya kapasitas kelembagaan di desa sehingga kualitas pengelolaan desa menjadi tidak begitu efektif dan efisien. Oleh karena itu, perluasan jangkauan pelayanan melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar perlu untuk diupayakan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Jika memperhatikan data, isu perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender mengalami progress positif. Momentum positif terjadi khususnya pada peningkatan penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan semakin meningkatnya peran perempuan dalam organisasi dan pembangunan. Hal ini memberikan sinyal positif bahwa perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender mendapat respon positif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kondisi ini tentu harus dipertahankan dan perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga momentum positif tersebut dapat *sustain* dan semakin berkualitas.

3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis

Tuntutan pembangunan modern memaksa perangkat daerah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit. Sampai pada tahun 2019, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum berjalan optimal. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih. Inilah sebabnya mengapa pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih perlu untuk ditingkatkan.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Hulu Sungai Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah urusan Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Predikat AKIP	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA
				Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	<p>Alasan Pemilihan : Persentase rata-rata usia kawin pertama masuk dalam indikator kinerja adalah dalam rangka melaksanakan program KB serta pengendalian penduduk dengan sasaran para remaja untuk tidak kawin muda / pendewasaan usia perkawinan (PUP)</p> <p>Cara Perhitungan Indikator : $\frac{\text{Jumlah wanita kawin pertama usia } < 20 \text{ tahun}}{\text{Jumlah total perkawinan}} \times 100\%$</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Bidang KB - Laporan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
4	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>Alasan Pemilihan : IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan yang diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan gender. Dengan IPG dapat mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.</p> <p>Cara Perhitungan Indikator : $IPG = 1/3 (X EDE(1) + X EDE(2) + I inc-dis)$</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Bidang Pemberdayaan Perempuan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA
			Keterangan : X EDE(1) = X EDE untuk harapan hidup I inc-dis = Indeks distribusi penghasilan	
		Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	<p>Alasan Pemilihan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat 2 UUD Negara RI tahun 1945); 2. UU NO. 35 th 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Permen Pemberdayaan Perempuan No. 13 th 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan <p>Cara Perhitungan Indikator : $\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$</p>	Laporan Bidang Perlindungan Anak

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah (*top-down*) dan ke samping (*horizontal-diagonal*) dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*);
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Hulu Sungai Selatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAB. HULU SUNGAI SELATAN

2.2.1 SEKRETARIAT (URUSAN LAYANAN/PENUNJANG RUTIN)

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Predikat AKIP	Predikat	81,89 (A)	0	0	0	81,89 (A)
		1 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Persen	100 %		100%		100%
		1.1 Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	5	9	12	15
		1.2 Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	8	10	11	12

Pada tabel 2.2, dapat dijelaskan bahwa sekretariat merupakan urusan layanan/urusan rutin. Dimana tujuan merupakan Misi 5 (lima) dari RPJMD 2018 – 2023. Yang dari Indeks Reformasi Birokrasi target sebesar 23,50. Untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendukung hasil dari Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu Nilai / Predikat AKIP sebesar 81,89. Dengan Perjanjian Kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 1 program yaitu Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 2 (dua) kegiatan yaitu : Penyusunan Dokumen AKIP sebanyak 15 (sebelas) dokumen dan Penyusunan Dokumen Keuangan sebanyak 12 (dua belas) dokumen.

Aspek pemenuhan dokumen-dokumen AKIP yaitu :

Nama Dokumen		Jumlah
1	Renstra	1 dokumen
2	Berita Acara Reviu Renstra	1 dokumen
3	Cascading Kinerja Tahun 2019	1 dokumen
4	Renja 2019 (Murni, Perubahan)	2 dokumen
5	IKU + SK 2019	1 dokumen
6	PK Murni 2019 Ess II s.d Ess IV Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
7	PK Perubahan 2019 Ess II s.d Ess IV Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
8	Rencana Aksi 2019	1 dokumen
9	Capaian Kinerja Triwulan Th. 2019	4 dokumen
10	Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2019	1 dokumen
11	Peta Strategi & Struktur Organisasi serta Template Format Keselarasan Kinerja	1 dokumen
Jumlah		15 dokumen

Untuk Aspek pemenuhan dokumen-dokumen AKIP, pemasangan ditarget di triwulan diambil berdasarkan dokumen berurutan. Dan pada triwulan 1 mempunyai target lebih besar dibandingkan dengan triwulan lain yaitu 10, dikarenakan penyusunan dokumen inti seperti Renstra, Renja, Dokumen Cascading, SK IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan dokumen pendukung lainnya terlebih dahulu dibuat, karena sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan yaitu :

Nama Dokumen		Jumlah	
1	Renstra	1	dokumen
2	Renja	1	dokumen
3	RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan	2	dokumen
4	PRA RKA Murni dan Perubahan	2	dokumen
5	RKA Murni	1	dokumen
6	RKA Perubahan	1	dokumen
7	DPA	1	dokumen
8	Laporan Triwulan	1	dokumen
9	Laporan Prognosis Semesteran 1	1	dokumen
10	Laporan Tahunan (CALAK)	1	dokumen
Jumlah		12	dokumen

Sedangkan untuk Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan, pemasangan di target di triwulan diambil berdasarkan dokumen berurutan. Dan pada triwulan 1 mempunyai target lebih besar dibandingkan dengan triwulan lain yaitu 8, dikarenakan penyusunan dokumen inti seperti Renstra, Renja, RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan, Dokumen PRA RKA Murni dan Perubahan, RKA Murni, DPA, Laporan Triwulan, terlebih dahulu dibuat, karena sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari segi keuangan dan pelaksanaan kegiatan.

2.2.2 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	12	13	14
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
Menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun			Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia ≤ 20 tahun	Persen	73,02	0	0	0	73,02
	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja		Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	Persen	73,02	0	0	0	73,02
		Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	Persen	10	2,5	5,0	7,5	2,5
			Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Persen	78,89	70	75	78,9	78,99
		Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah remaja teradvokasi dan menerima Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja	orang	357	140	257	307	357
		Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	PUS	34.612	34.312	34.412	34.512	34.812

Tujuan	Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2		5	6	7	10	11	12	13	14
			Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	Persen	60,2	50,17	53,51	56,86	21,08
				Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK	Persen	18,18		9,09		18,18
			Pembinaan kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	kelompok	180	150	160	170	180
			Penyusunan data kependudukan dan keluarga	Jumlah instansi KB yang menyelenggarakan program KKBPK	buah	2	0	1	0	2

Pada tabel 2.2.2 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dijelaskan bahwa tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun. Sebagai alur pendukung dari tujuan Dinas maka disusun program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu:

1. Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan target:
 - a. Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan sebesar 10% dan,
 - b. Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif sebesar 78,89 %
2. Program Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan target:
 - a. Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif sebesar 60,2 %, dan
 - b. Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK sebesar 18,18 %

Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) mempunyai 2 kegiatan yaitu:

- 1) Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan target 357 orang, target triwulan I sebanyak 140 orang, target triwulan II sebanyak 257 orang, target triwulan III sebanyak 307 orang dan target triwulan IV sebanyak 357 orang. Target pada triwulan adalah hasil kumulatif pada tiap triwulan.
- 2) Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dengan target 34.612 PUS, target triwulan I sebanyak 34.312 PUS, target triwulan II sebanyak 34.412 PUS, target triwulan III sebanyak 34.512 PUS dan target triwulan IV sebanyak 34.612 PUS. Target pada triwulan adalah hasil kumulatif pada tiap triwulan.

Program Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai 2 kegiatan yaitu:

- 1) Pembinaan kelompok kegiatan ketahanan keluarga dengan target 180 kelompok, target triwulan I sebanyak 150 kelompok, target triwulan II sebanyak 160 kelompok, target triwulan III sebanyak 170 kelompok, dan target triwulan IV sebanyak 180 kelompok. Target pada triwulan adalah hasil kumulatif pada tiap triwulan.

- 2) Penyusunan data kependudukan dan keluarga dengan target 2 instansi, dilaksanakan pada triwulan II dan triwulan IV. Target pada triwulan IV adalah hasil komulatif pada tiap triwulan.

2.2.3. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	12	13	14
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pangarusutamaan gender serta perlindungan anak			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,27	0	0	0	90,27
	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,27	0	0	0	90,27
			Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	Persen	2,03	0,67	1,35	0	2,03
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	Persen	36,84	0	36,84	0	0
		Pelaksanaan PUG di tingkat daerah	Jumlah SKPD yang perencanaan dan penganggaran responsif gender	SKPD	10	0	10	0	0

			Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	Persen	8,11	0	5,95	8,11	0
			Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	Jumlah organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang dibina	organisasi	6	0	3	6	0
			Program Peningkatan Pelindungan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
			Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Jumlah PATBM desa yang aktif	buah	2	0	1	0	2
			Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak berbasis kluster	Persen	27,78	5,56	5,56	7,41	9,26
			Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah indikator yang terpenuhi	kluster	15	3	3	4	5

Pada tabel 2.2.3 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pangarusutamaan gender serta perlindungan anak. Sebagai alur pendukung dari tujuan Dinas maka disusun program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan target:
Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender sebesar 36,84%,
2. Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan dengan target:
Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif sebesar 8,11 %,
3. Program Peningkatan Perlindungan Anak dengan target:
Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan 100 %, dan
4. Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dengan target:
Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layan anak berbasis kluster sebesar 27,78%.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender (PUG) dengan target 10 SKPD dimana kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II. Adapun 10 SKPD yang menjadi target adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian, dan Dinas Sosial

Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dengan target 6 organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang akan dilaksanakan pada triwulan II dan pada

triwulan III. Organisasi perempuan yang akan dibina yaitu Dharma Wanita Persatuan Kab. HSS, Gabungan Isteri Wakil Rakyat (GATRIWARA) Kab. HSS, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. HSS, Muslimat NU, Salimah, dan Katalia.

Program Peningkatan Perlindungan Anak mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan target 2 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) desa yang aktif, dimana akan dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II dengan masing-masing 1 PATBM desa yang aktif.

Program Peningkatan Perlindungan Anak mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan target 2 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) desa yang aktif, dimana akan dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II dengan masing-masing 1 PATBM desa yang aktif.

Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pelayanan Pemenuhan Hak Anak dengan target 15 indikator yang terpenuhi, target triwulan I sebanyak 3 indikator, target triwulan II sebanyak 3 indikator, target triwulan III sebanyak 4 indikator dan target triwulan IV sebanyak 5 indikator.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK), juga tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Dengan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan tujuan dan sasaran.

Pada bab ini akan disajikan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target Triwulan II serta realisasi anggaran Triwulan II (dua) tahun 2019.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka tujuan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran seperti pada tabel berikut.

TABEL 3.1

PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT TRIWULAN II

Tujuan	Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)				
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2		5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50							
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			Predikat AKIP	Predikat	81,89 (A)	0	0	0	81,89 (A)	0	0							
	1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Persen	79,8	0	0	0	81,46	0	0								
			Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Persen	100%	66,67%	83,33%	91,66%	100%	66,67%	83,33%					100 %	100 %		
		1.1	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen	15	5	9	12	15	5	9					100 %	100 %		
		1.2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen	12	3	6	9	12	3	6					100 %	100 %		
	2	Program Pelayanan Administrasi	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100						100 %	100 %	

Tujuan	Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2		5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Perkantoran															
		2.1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun			100 %	100 %		
		2.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun			100 %	100 %		
		2.3	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0	0	0,50 tahun	1 tahun	0	0			0	0		
		2.4	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun			100 %	100 %		
		2.5	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun			100 %	100 %		
		2.6	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun			100 %	100 %		
		3	Program Peningkatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100			100 %	100 %		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Sarana dan Prasarana Aparatur														
		3.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	tahun	1 tahun	0,5 tahun	1 tahun	0	0	0,5 tahun	1 tahun			100 %	100 %	
		3.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun			100 %	100 %	
		3.3	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun	0,75 tahun	1 tahun	0,25 tahun	0,50 tahun			100 %	100 %	
		4	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100			100 %	100 %	
		4.1	Pembinaan Program KBKR	Jumlah kegiatan KBKR	kegiatan	5 kegiatan	2 kegiatan	4 kegiatan	5 kegiatan	0	2 kegiatan	4 kegiatan			100 %	100 %	
		4.2	Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	Jumlah kegiatan ketahanan keluarga	kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	0	3 kegiatan	0	2 kegiatan	0			100 %	100 %	

Tujuan	Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2		5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat	kegiatan	5 kegiatan	1 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan	5 kegiatan	1 kegiatan	3 kegiatan			100 %	100 %		
		4.3	Partisipasi Anak	Jumlah kegiatan partisipasi anak	kegiatan	2 kegiatan	0	0	2 kegiatan	0	0	0			100 %	100 %		

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, pencapaian kinerja urusan kesekretariatan, sebagai tujuan sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada triwulan 1 ini realisasi yang ada tidak bisa dilaporkan sebagai laporan Realisasi sasaran karena bentuknya kegiatan selama setahun, sehingga output/keluaran akan disampaikan pada triwulan 4 (empat). Pada tabel diatas mempunyai program utama sebanyak 1 program dengan kegiatan utama 2 buah. Untuk kegiatan rutin program pendukung terdapat 3 buah dan kegiatan pendukung sebanyak 13 buah yang dilaksanakan sesuai rutin pengelolaan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan yang terkait dengan Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Indikator Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah dengan kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP dan Penyusunan Dokumen Keuangan.

Pada indikator kinerja sasaran pertama Indeks Reformasi Birokrasi hasil capaian kami target Triwulan 4 namun masih belum bisa diukur karena masih tahap persiapan kegiatan. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak melakukan pelayanan publik langsung, melainkan Indeks Reformasi Birokrasi yang diukur adalah pelayanan rutin Sekretariat kepada bidang-bidang baik dalam hal urusan ketatausahaan maupun urusan kepegawaian. Sedangkan indikator kinerja sasaran yang kedua yaitu Nilai/Peringkat AKIP hasil capaian juga kami target pada triwulan 4 masih belum bisa diukur karena hasil penilaian evaluasi Laporan AKIP oleh Kemenpan RB dilakukan pada triwulan 4.

Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, memiliki target kegiatan 70,37% atau jumlah 19 dokumen dari total jumlah 27 dokumen, dimana 9 untuk Dokumen Penyusunan AKIP dan 10 Dokumen dari penyusunan Dokumen Keuangan. Dari Kegiatan

Penyusunan AKIP, telah dilaksanakan sebanyak 9 di Triwulan II yaitu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

	Nama Dokumen		Jumlah
1	Renstra	1	dokumen
2	Renja 2019 (Murni)	1	dokumen
3	IKU + SK 2019	1	dokumen
4	Cascading 2019)	1	dokumen
5	PK Murni 2019 S.D Ess Iv Dan Jabatan Fungsional (Pelaksana)	1	dokumen
6	Pra RKA 2020	1	dokumen
7	Capaian Kinerja Triwulan Th. 2019	1	dokumen
8	LKj Triwulan	2	dokumen
	Jumlah	9	dokumen

Sedangkan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan, pada Triwulan II sebanyak 3 Dokumen yaitu Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan per bulan selama 3 bulan.

Pada indikator kinerja program kami target di tiap triwulan pada aspek pemenuhan dokumen untuk kegiatan pelaporan AKIP yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan dan Akhir Tahun, serta aspek pemenuhan dokumen untuk pelaporan keuangan yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan, Semester dan Akhir.

Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di targetkan pada triwulan II 5 kegiatan dari 6 kegiatan yang ada dan sudah dilaksanakan 5 kegiatan dengan capaian 100 % yaitu kegiatan penyediaan jasa dan administrasi perkantoran, kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan penyediaan makan dan minuman, kegiatan rapat-rapat koordinasi, konsultasi dengan lapangan serta kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya.

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di targetkan pada triwulan II 3 kegiatan dan sudah dilaksanakan 3 kegiatan dengan capaian 100 % yaitu kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Pada Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah di targetkan pada triwulan I 3 kegiatan dari 4 kegiatan dan sudah dilaksanakan 3 kegiatan dengan capaian 100 % yaitu kegiatan pembinaan

program KBKR, kegiatan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga serta kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat.

TABEL 3.2
PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
Menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun			Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia ≤ 20 tahun	Persen	73,02	0	0	0	73,02	0	0			0	0		
	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja		Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	Persen	73,02	0	0	0	73,02	0	0			0	0		
		Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	Persen	10	2,5	5,0	7,5	10	2,5	5,0			100 %	5,0		
			Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Persen	78,89	78,40	78,65	78,9	78,99	78,40	78,56			100 %	99,88%		
		Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi	Jumlah remaja teradvokasi dan menerima Komunikasi, Informasi dan Edukasi	orang	357	140	257	307	357	201	311			143,7 %	121,01%		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
		Remaja (KRR)	Kesehatan Reproduksi Remaja														
		Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	PUS	34.612	34.312	34.412	34.512	34.812	37.238	37.655			108,29%	109,42%		
		Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK FISIK)	Jumlah Balai KKB Kecamatan	Balai KKB Kec	11	4	8	11	11	0	8			0	8		
		Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK NF)	Jumlah balai KKB Kec. yang mendapat dukungan operasional keg. program KKBPK	Balai KKB Kec	11	4	8	11	11	4	8			100%	8		
		Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan (DAK NF)	Jumlah faskes keluarga berencana yang mendapatkan bantuan alat dan obat kontrasepsi (Alokon)	Faskes KB	26	9	18	26	26	9	18			100%	18		
		Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB (DAK NF)	Jumlah kampung KB yang mendapat dukungan integrasi program KKBPK dan program lainnya	Kampung KB	22	7	14	22	22	0	14			0	14		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK NF)	Kader PPKBD	148	50	100	148	148	50	100			100%	100%		
			Jumlah kader Sub PPKBD di desa yang mendapat dukungan program KKBP	Kader Sub PPKBD													
			Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK NF)	buah	11	4	8	11	11	4	8			100%	100%		
			Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persen	60,2	50,17	53,51	56,86	60,20	48,13	50,00			95,93 %	93,44%		
			Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBP	Persen	18,18	0	9,09	0	18,18	0	9,09			0	100%		
			Pembinaan kelompok kegiatan ketahanan keluarga	kelompok	180	150	160	170	180	154	160			102,67%	100%		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Penyusunan data kependudukan dan keluarga	instansi	2	0	1	0	2	0	1			0	100 %		

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, pencapaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sebagai tujuan sasaran strategis yaitu menurunkan pernikahan di bawah usia 20 tahun pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada triwulan II ini realisasi yang ada tidak bisa dilaporkan sebagai laporan Realisasi sasaran karena bentuknya kegiatan selama setahun karena merupakan hasil Survey Susenas, sehingga output/keluaran akan disampaikan pada triwulan 4 (empat). Pada tabel diatas mempunyai 2 program yaitu Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan Program Peningkatan Keluarga Sejahtera.

Pada Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) memiliki 2 indikator kinerja program yaitu Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan yang mana pada triwulan II ditargetkan 3 organisasi dan sudah terealisasi 3 organisasi dengan capaian 100% total organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan sampai Triwulan II sebanyak 6 organisasi, dan pada indikator Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif pada triwulan II ditargetkan 78,40 % PUS dan sudah terealisasi 78,40% dengan capaian 100%. Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif berasal dari jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 37,815 dan jumlah PUS sebesar 48.134 (Data capaian berasal dari laporan Statistik Rutin BKKBN). Untuk pencapaian program tersebut ada 8 kegiatan dengan 2 kegiatan yang bersumber pada Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan sasaran remaja/anak berusia 15-19 tahun yang diberikan sosialisasi dan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan dan kegiatan Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dengan sasaran Pasangan Usia Subur, serta 6 kegiatan yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pada Program Peningkatan Keluarga Sejahtera memiliki 2 indikator kinerja program yaitu persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif dan persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK. Pada indikator persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif pada triwulan II ditargetkan 53,51% kelompok kegiatan, akan tetapi pada triwulan II ini

hanya terealisasi 50,00 % dengan capaian kinerja sebesar 93,44%. Sedangkan pada persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK sudah terealisasi sesuai target yaitu 1 instansi dengan capaian 100%. Untuk mendukung indikator ini pada triwulan II sudah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi teknis bulanan bidang PPKS yang diikuti oleh Bidang Keluarga Berencana dan seluruh PKB se-Kab HSS, memonitor laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan, meentry data laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan dan membuat laporan bulanan hasil dari laporan pengendalian lapangan 11 kecamatan.

Tabel 3.3

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pangarusutamaan gender serta perlindungan anak			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,98	0	0	0	89,98	0	0			0	0		
	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,96	0	0	0	90,58	0	0			0	0		
			Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	Persen	2,03	0,67	1,35	0	2,03	0,67	1,35			100 %	100 %		
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	Persen	36,84	0	36,84	0	0	0	36,84			100 %	100 %		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
			Pelaksanaan PUG di tingkat daerah	SKPD	10	0	10	0	0	0	10			0	100 %		
			Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Persen	8,11	0	5,95	8,11	0	0	5,95			0	100 %		
			Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	organisasi	6	0	3	6	0	0	3			0	100 %		
			Program Peningkatan Pelindungan Anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100			100%	100 %		
			Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	buah	2	0	1	0	2	0	1			0	100 %		
			Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persen	27,78	5,56	5,56	7,41	9,26	5,56	5,56			100 %	100 %		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	5	6	7	10	11	11	11	11	11	12	13	14			13	14
		Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah indikator yang terpenuhi	kluster	15	3	3	4	5	3	3			100 %	100 %		

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, pencapaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai tujuan sasaran strategis yaitu meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pangarusutamaan gender serta perlindungan anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada triwulan II ini ada realisasi yang tidak bisa dilaporkan sebagai laporan Realisasi sasaran karena bentuknya kegiatan selama setahun karena merupakan hasil Survey dari BPS, sehingga output/keluaran akan disampaikan pada triwulan 4 (empat). Pada tabel diatas mempunyai 4 program yaitu Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan, Program Peningkatan Perlindungan Anak dan Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

Pada program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan mempunyai indikator kinerja program Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender yang mana pada triwulan II sudah dilaksanakan kegiatan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender. Adapun SKPD yang mengikuti kegiatan tersebut yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian, Dinas Sosial. Selain kegiatan tersebut juga dilaksanakan rapat Koordinasi Pangarusutamaan Gender (PUG) dengan 4 driver PUG yaitu Inspektorat, Bakeuda, Bappelitbangda dan Dinas PPKBPPPA.






Untuk Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan mempunyai indikator kinerja program yaitu Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif yang mana pada triwulan II sudah dilaksanakan sosialisasi dengan beberapa organisasi yaitu Dharma Wanita Persatuan Kab. HSS, Gabungan Isteri Wakil Rakyat (GATRIWARA) Kab. HSS dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. HSS. Untuk mendukung indikator tersebut pada triwulan II juga dilaksanakan sosialisasi perlindungan perempuan dalam rumah tangga yang dilaksanakan di kecamatan Loksado.

Program Peningkatan Perlindungan Anak mempunyai indikator kinerja program persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan, dimana pada triwulan II ini ditargetkan 100% dan sudah terealisasi 100% dengan jumlah kasus anak yang dilaporkan 1 kasus dan sudah diselesaikan 1 kasus. Untuk mendukung penurunan kasus pada anak dibentuk Tim Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak dengan anggota antara lain terdiri dari Jaksa anak, Pengacara, Kepolisian, RUTAN, Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, Kemenag, Peksos/Dinas Sosial, terlaksananya sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang mana pada triwulan II sudah dibentuk PATBM pada kelurahan kandang barat menjadi PATBM yang aktif.





Pada program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai indikator kinerja program yaitu Tingkat pemenuhan aspek Desa/Kelurahan Layak Anak berbasis Klaster, dimana pada triwulan II ditargetkan 5,56 % dan sudah terealisasi 5,56% dengan perhitungan total 6 indikator sudah terealisasi sampai pada triwulan II dari 15 indikator dengan capaian kinerja 100%. Untuk mendukung pencapaian tersebut sudah dilaksanakan Pembinaan pada Desa/Kelurahan yang menginisiasi menjadi Desa/kelurahan Layak Anak, Pembinaan Puskesmas dengan pelayanan ramah anak, Terbinanya Sekolah yang menginisiasi menjadi Sekolah Ramah Anak, Terlaksananya Rapat evaluasi Kabupaten Layak Anak dan Terlaksananya kegiatan forum anak di Kab. HSS.

Dari keseluruhan hasil capaian kinerja urusan/bidang terkait yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, rangkuman capaian dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2019
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KAB. HSS

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan		Status	Keterangan
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50		
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Predikat AKIP	Predikat	81,89 (A)	0	0	0	81,89 (A)	0	0		Capaian target di akhir (TW IV)
Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	Persen	73,02	0	0	0	73,02	0	0		Capaian target di akhir (TW IV)
Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,96	0	0	0	90,58	0	0		Capaian target di akhir (TW IV)
	Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	Persen	2,03	0,67	1,35	0	2,03	0,67	1,35		

Keterangan:

-  Capaian > 100 %
-  Capaian > 90% - 100 %
-  Capaian > 75% - 90 %
-  Capaian < 50 %

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas, indikator sasaran yang pertama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi pencapaian realisasi sama dengan target atau dengan kata lain tercapai 100%, begitu juga indikator sasaran ke 5 (lima) yaitu Persentase desa/kelurahan layak anak pencapaian kinerjanya 100% dikarenakan pada triwulan I masih dalam proses pembinaan untuk desa/kelurahan layak anak.

Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran ke dua yaitu predikat AKIP realisasi ditargetkan pada triwulan IV karena pada triwulan tersebut baru akan dilakukan penilaian oleh Inspektorat. Untuk indikator ke 3 (tiga) dan 4 (empat) yaitu persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunggu hasil survey dari Susenas untuk indikator ke 3 dan hasil survey dari Badan Pusat Statistik (BPS)

3.2. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini akan diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Di dalamnya terdapat alokasi anggaran, realisasi keuangan, persentasi capaian dan sisa anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2019 yang diambil dari Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Total Pagu Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp. 6.225.505.700,00 dan Realisasi anggaran pada sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 Bidang Keluarga Berencana sebesar Rp. 532.999.060,00, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp. 31.161.200,00, Bidang Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 33.735.750,00, Bidang Perlindungan Anak sebesar Rp. 30.457.415,00, dan Sekretariat sebesar Rp. 658.483.420,00. Adapun rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN 2019
BERDASARKAN URUSAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KAB. HSS

1. Kesekretariatan (layanan penunjang perangkat daerah)

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1.475.551.750	540.793.200	408.322.450	263.591.750	262.844.350	238.842.314	419.641.106	0	0	36,65%	27,67%	17,86%	17,81%	16,19%	28,44%	0	0,00%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	599.432.850	153.880.300	143.081.100	145.130.300	157.341.150	53.093.922	120.656.856	0	0	25,67	23,87	24,21%	26,25%	8,86%	20,13%	0	0,00%
Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	44.545.200	11.324.500	11.074.500	11.074.500	11.071.700	10.483.400	9.625.900	0	0	25,42%	24,86%	24,86%	24,85%	23,53%	21,61%	0	0,00%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	63.600.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	5.787.983	8.744.984	0	0	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	9,10%	13,75%	0	0,00%
Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	14.000.000	0	0	2.700.000	11.300.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	19,29%	80,71%	0,00%	0,00%	0	0,00%
Penyediaan makanan dan minuman	28.104.000	10.700.800	5.001.600	3.700.800	8.700.800	2.760.000	3.240.000	0	0	38,08%	17,80%	13,17%	30,96%	9,82%	11,53%	0	0,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	45.850.000	15.125.000	10.275.000	10.925.000	9.525.000	9.150.000	11.850.000	0	0	32,99%	22,41%	23,83%	20,77%	19,96%	25,85%	0	0,00%

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	403.333.650	100.830.000	100.830.000	100.830.000	100.843.650	24.912.539	87.195.972	0	0	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	6,18%	21,62 %	0	0,00%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	242.829.000	165.729.000	25.700.000	25.700.000	25.700.000	39.368.492	77.129.300	0	0	68,25%	10,58%	10,58%	10,58 %	16,21%	31,76 %	0	0,00%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	80.239.000	80.239.000	0	0	0	32.306.000	13.844.000	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,26%	17,25 %	0	0,00%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	94.520.000	23.645.000	23.625.000	23.625.000	23.625.000	6.312.492	11.923.300	0	0	25,02%	24,99%	24,99%	24,99%	6,68%	12,61 %	0	0,00%
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	68.070.000	61.845.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	750.000	51.362.000	0	0	90,86%	3,05%	3,05%	3,05%	1,10%	75,45 %	0	0,00%
Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.610.000	2.206.500	2.401.500	2.606.500	1.440.000	477.500	2.503.300	0	0	22,96%	24,99%	27,12%	24,93%	4,97%	26,05 %	0	0,00%
Penyusunan Dokumen Keuangan	4.700.000	1.129.000	1.124.000	1.329.000	1.118.000	0	925.800	0	0	24,02%	23,91%	28,28%	23,79%	0,00%	19,70 %	0	0,00%
Penyusunan Dokumen AKIP	4.910.000	1.077.500	1.277.500	1.277.500	1.277.500	477.500	1.577.500	0	0	21,95%	26,02%	26,02%	26,02%	9,73%	32,13 %	0	0,00%
Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	623.679.900	218.977.400	237.139.850	90.154.950	77.407.700	145.902.400	219.351.650	0	0	35,11%	38,02 %	14,46%	12,41%	23,39%	35,17 %	0	0,00%
Pembinaan Program KBKR	54.937.900	43.837.900	5.900.000	5.200.000	0	745.000	34.601.300	0	0	79,80%	10,74%	9,47%	0,00%	1,36%	62,98 %	0	0,00%
Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	56.076.700	35.880.700	600.000	19.396.000	200.000	10.900.000	2.080.700	0	0	63,99%	1,07%	34,59%	0,36%	19,44%	3,71%	0	0,00%

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	483.315.300	139.258.800	230.639.850	36.208.950	77.207.700	134.257.400	182.669.650	0	0	28,81%	47,72%	7,49%	15,97%	27,78%	37,80 %	0	0,00%
Partisipasi Anak	29.350.000	0	0	29.350.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%

Pada tabel 3.6, untuk kesekretariatan, Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (Sekretariat). Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan pagu dana sebesar Rp. 9.610.000,- , dengan target triwulan II sebesar Rp. 2.401.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.503.300,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 24,99% dan capaian realisasi keuangan sebesar 26,05%.

Kemudian untuk Program Pelayanan Administrasi Kantor, dengan pagu Rp. 599.432.850,-. dengan target triwulan II sebesar Rp. 143.081.000,-. dan realisasi keuangan sebesar Rp. 120.656.856,-, sehingga capaian target rencana belanja sebesar 23,87% dan capaian realisasi keuangan sebesar 20,13%. Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan pagu Rp. 242.829.000,-. dengan target triwulan I sebesar Rp. 25.700.000,-. dan realisasi keuangan sebesar Rp. 77.129.300,-, sehingga capaian target rencana belanja sebesar 10,58% dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 31,76% .

Pada Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan program “sapu jagad” dimana kegiatan yang ada pada program ini merupakan kegiatan yang ada pada masing-masing bidang yang tidak mempunyai indikator khusus. Adapun pagu pada program ini sebesar Rp. 623.679.900,00 dengan target pada triwulan I Rp. 237.139.850,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 219.351.650,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 38,02% dan capaian realisasi keuangan sebesar 35,17%.

2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	4.584.721.150	417.902.000	2.303.666.640	1.134.136.210	729.016.300	120.855.500	443.304.760	0	0	9,12%	50,25%	24,74%	15,90%	2,64%	9,67%	0	0,00%
Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja	4.51.712.500	409.739.50	2.270.091.390	1.121.991.210	719.890.400	118.875.500	414.123.560	0	0	9,06%	50,20%	24,81%	15,92%	2,63%	9,16%	0	0,00%
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	39.978.600	13.815.000	19.332.000	6.831.600	0	12.575.500	0	0	0	34,56%	48,36%	17,09%	0,00%	31,46%	0,00%	0	0,00%
Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	259.507.900	69.281.500	72.428.000	70.586.500	47.211.900	56.800.000	28.950.000	0	0	26,70%	27,91%	27,20%	18,19%	21,89%	11,16%	0	0,00%
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK)	1.085.159.000	0	1.085.159.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%
Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK NF)	955.796.460	99.295.000	358.766.460	287.985.000	209.750.000	49.500.000	223.825.560	0	0	10,39%	37,54%	30,13%	21,95%	5,18%	23,42%	0	0,00%
Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan (DAK NF)	40.500.000	4.500.000	13.500.000	13.500.000	9.000.000	0	780.000	0	0	11,11%	33,33%	33,33%	22,22%	0,00%	1,93%	0	0,00%
Operasional Penggerakan Program KKBPK di	985.600.000	109.515.000	328.585.000	328.500.000	219.000.000	0	58.450.000	0	0	11,11%	33,34%	33,33%	22,22%	0,00%	5,93%	0	0,00%

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Kampung KB (DAK NF)																	
Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK NF)	267.170.540	14.668.000	96.310.930	118.593.110	37.598.500	0	46.258.000	0	0	5,49%	36,05%	44,39%	14,07%	0,00%	17,31%	0	0,00%
Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK NF)	888.000.000	98.665.000	296.010.000	295.995.000	197.330.000	0	55.860.000	0	0	11,11%	33,33%	33,33%	22,22%	0,00%	6,29%	0	0,00%
Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	63.008.650	8.162.500	33.575.250	12.145.000	9.125.900	1.980.000	29.181.200	0	0	12,95%	53,29%	19,28%	14,48%	3,14%	46,31%	0	0,00%
Pembinaan kelompok ketahanan keluarga	41.302.750	6.182.500	30.605.250	4.515.000	0	0	26.211.200	0	0	14,97%	74,10%	10,93%	0,00%	0,00%	63,46%	0	0,00%
Penyusunan Data Kependudukan dan Keluarga	21.705.900	1.980.000	2.970.000	7.630.000	9.125.900	1.980.000	2.970.000	0	0	9,12%	13,68%	35,15%	42,04%	9,12%	13,68%	0	0,00%

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang memiliki sasaran Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja didukung dengan 2 (dua) program yaitu Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dibawah koordinasi Bidang Keluarga Berencana dimana pagu pada program ini sebesar Rp. 4.521.712.500,- yang merupakan perpaduan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 299.486.500,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 4.222.226.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 2.270.091.390,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 414.123.560,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 50,20% dan capaian realisasi keuangan sebesar 9,16%.

Untuk program Peningkatan Keluarga Sejahtera dibawah koordinasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera memiliki pagu sebesar Rp. 63.008.650,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 33.575.250,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.181.200,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 53,29% dan capaian realisasi keuangan sebesar 46,31%.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran/ Program/Kegiatan	Pagu	TARGET RENCANA BELANJA				REALISASI KEUANGAN				CAPAIAN TARGET RENCANA BELANJA (%)				CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	165.232.800	22.772.600	56.294.350	64.843.350	21.322.500	8.319.690	55.873.475	0	0	13,78%	34,07%	39,24%	12,90%	5,04%	33,82%	0	0,00%
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	38.497.500	0	29.003.750	9.493.750	0	0	29.003.750	0	0	0,00%	75,34%	24,66%	0,00%	0,00%	75,34%	0	0,00%
Pelaksanaan Manajemen PUG di tingkat	38.497.500	0	29.003.750	9.493.750	0	0	29.003.750	0	0	0,00%	75,34%	24,66%	0,00%	0,00%	75,34%	0	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	10.045.000	2.262.500	3.912.500	2.632.500	1.237.500	1.131.000	3.601.000	0	0	22,52%	38,95%	26,21%	12,32%	11,26%	35,85%	0	0,00%
Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	10.045.000	2.262.500	3.912.500	2.632.500	1.237.500	1.131.000	3.601.000	0	0	22,52%	38,95%	26,21%	12,32%	11,26%	35,85%	0	0,00%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK	92.724.300	10.428.100	18.603.100	45.058.100	18.635.000	5.715.300	18.196.700	0	0	11,25%	20,06%	48,59%	20,10%	6,16%	19,62%	0	0,00%
Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	92.724.300	10.428.100	18.603.100	45.058.100	18.635.000	5.715.300	18.196.700	0	0	11,25%	20,06%	48,59%	20,10%	6,16%	19,62%	0	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN ANAK	23.966.000	10.082.000	4.775.000	7.659.000	1.450.000	1.473.390	5.072.025	0	0	42,07%	19,92%	31,96%	6,05%	6,15%	21,16%	0	0,00%
Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	23.966.000	10.082.000	4.775.000	7.659.000	1.450.000	1.473.390	5.072.025	0	0	42,07%	19,92%	31,96%	6,05%	6,15%	21,16%	0	0,00%

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang memiliki sasaran meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak didukung dengan 4 (empat) program yaitu Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dan Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dibawah koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Program Peningkatan Perlindungan Anak dibawah koordinasi Bidang Perlindungan Anak.

Pada Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan memiliki pagu sebesar Rp. 38.497.500,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 29.003.750,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.003.750. Untuk program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan memiliki pagu sebesar Rp. 10.045.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 3.912.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.601.000,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 38,95% dan capaian realisasi keuangan sebesar 35,85%.

Pada Bidang Perlindungan Anak terdapat Program Pemenuhan Hak Anak yang memiliki pagu sebesar Rp. 92.724.300,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 18.603.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.196.700,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 20,06% dan capaian realisasi keuangan sebesar 19,62% dan Program Peningkatan Perlindungan Anak yang memiliki pagu sebesar Rp. 23.966.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 4.775.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.072.025,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 19,92% dan capaian realisasi keuangan sebesar 21,16%.

Tabel 3.6
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2019
BERDASARKAN URUSAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KAB. HSS

Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator	REALISASI ANGGARAN (%)				REALISASI KINERJA (%)				%			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
SEKRETARIAT													
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Predikat AKIP	16,19	28,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan Pelayanan	8,86	20,13	0	0	100	100	0	0	11,29	4,97	0	0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kepuasan Pelayanan	16,21	31,76	0	0	100	100	0	0	6,17	3,15	0	0
Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP; Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	4,97	26,05	0	0	55,67	70,37	0	0	11,20	2,7	0	0
Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan Pelayanan	23,39	35,17	0	0	100	100	0	0	4,28	2,84	0	0
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	2,64	9,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan	2,63	9,16	0	0	2,5	5,0	0	0	0,95	0,55	0	0

Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator	REALISASI ANGGARAN (%)				REALISASI KINERJA (%)				REALISASI (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
	Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	2,63	9,16	0	0	78,40	78,65	0	0	29,81	8,59	0	0
Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	3,14	46,31	0	0	50,17	53,51	0	0	15,98	1,16	0	0
	Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK	3,14	46,31	0	0	0	9,09	0	0	0	0,19	0	0
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	5,04	33,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	5,04	33,82	0	0	0,67	1,35	0	0	0,13	0,04	0	0
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	0,00	75,34	0	0	0	36,84	0	0	0	0,49	0	0
Program peningkatan perlindungan hak perempuan	Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	11,26	35,85	0	0	0	5,95	0	0	0	0,17	0	0
Program pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	6,16	19,62	0	0	5,56	5,56	0	0	0,9	0,28	0	0
Program peningkatan perlindungan anak	Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak berbasis klaster	6,15	21,16	0	0	100	100	0	0	16,26	4,73	0	0

BAB IV

PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Triwulan II ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Triwulan II ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang ingin di capai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100% dan 0% atau belum mencapai target;
- 2) Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0% atau belum mencapai target;
- 3) Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 0% dan 1,35% atau belum mencapai target;

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 3 (tiga) sasaran tersebut, mayoritas pencapaian sasaran belum mampu mencapai target dikarenakan pada triwulan II Tahun 2019 ini masih banyak kegiatan

yang belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu pada Triwulan IV (merupakan hasil sensus BPS dan Susenas).

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 6.225.505.700,00 sedangkan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 sebesar Rp. 1.286.836.845,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 20,67%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.938.668.855,00.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan II Tahun 2019 ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kita semua khususnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sebagai gambaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada lintas sektor terkait lainnya baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 1 Juli 2019

Kepala Dinas PPKBPPPA



Drs. Hj. Is Susilastuti

Pembina Utama Muda

NIP. 19601219 198503 2 006